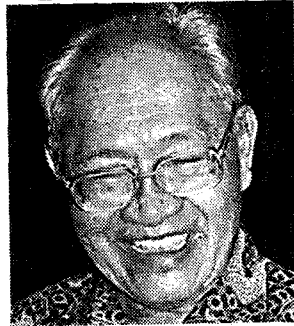


- Evaluasi dan prediksi bidang politik 1995/1996 (1)

Siapa pun tak bisa tolak keterbukaan



Soehardjo Ss



Ariel Heryanto



Aberson

PENGANTAR REDAKSI:

Koridor politik negeri ini telah dicoba dikuak pemerintah. Namun keterbukaan tampaknya belum berjalan semestinya. Demikian pula soal demokasri dan HAM. Untuk menguak lebih jauh kondisi perpolitikan di negeri ini sepanjang tahun 1995 dan bagaimana prediksi di tahun 1996, *Tim Wawasan* yang terdiri dari *Sulistyo* (Jakarta), *Mashuri AK* (Salatiga), *Eko Ariyanto*, *Achmad Ni'am Salim* dan *Lawu P Budihardjo* (Semarang), mencoba meminta pendapat Prof Soehardjo SS, SH, Aberson M Sihalofo, Dr Ariel Heryanto, Drs Marzuki Darusman dan menuangkannya lewat tulisan mulai hari ini.

PERHATIAN masyarakat terhadap keterbukaan, demokrasi dan HAM terasa makin meningkat. Ini tentunya suatu kondisi yang cukup menggembirakan, karena orang akan tidak sungkan-sungkan lagi bicara soal hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Orang menjadi tidak sungkan-sungkan lagi berbicara soal HAM.

Seperti yang diungkapkan Dr Ariel Heryanto, staf pengajar di UKSW Salatiga, bahwa masalah demokrasi, keterbukaan dan HAM di Indonesia selama dua tahun terakhir, jauh lebih baik bila dibandingkan 30 tahun yang lalu. Pendapatnya ini didukung pengamatannya terhadap beberapa kejadian yang cukup menonjol. Dicontohkannya kasus Majalah Tempo yang dibatalkan SIUPPnya oleh Menpen yang kemudian sampai di PTUN dimenangkan penggugat; kasus Arief Budiman, Sri Bintang, yang sekarang lebih terbuka dibandingkan sebelumnya. Meski demikian Ariel tak menolak masih adanya kecenderungan orang-orang yang tidak puas bahwa perjuangannya tidak berhasil, sehingga wajar kalau tidak puas dengan kondisi yang sekarang ini.

Ariel sadar bahwa pendapatnya ini kemungkinan akan banyak ditentang teman-temannya, toh dirinya tetap optimis ada kemajuan yang bisa dibanggakan, meskipun belum secara total.

Berbicara maraknya keterbukaan, menurut Prof Soehardjo SS, SH, guru besar emiritus Fakultas Hukum Undip, akan mempengaruhi kondisi politik tahun 1996 mendatang. Bahkan dirinya menegaskan, bahwa keterbukaan tak akan bisa ditolak lagi oleh siapa pun. Termasuk oleh pemerintah. Hal ini malah akan membuat informasi tentang penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oknum pejabat makin banyak yang terkuak ke permukaan. Dicontohkannya yang barusan terjadi, kasus yang dialami Menhub Haryanto Danutirto.

Pelanggaran-pelanggaran HAM pun, nanti juga akan makin banyak muncul ke permukaan. Di samping karena keterbukaan, juga akibat perkembangan ekonomi dan ketatanegaraan yang makin kompleks. Pelanggaran HAM di Indonesia akan dengan mudah dipantau masyarakat internasional.

Kekuatan pers

Selain itu, keterbukaan ini makin didukung oleh kekuatan pers yang makin berani pada tahun mendatang. Kemenangan gugatan Goenawan Moehammad atas SK Menpen soal pembatalan SIUPP akan dijadikan landasan kepastian hukum oleh pers.

Secara positif, keterbukaan ini akan membawa keuntungan pula bagi perkembangan politik dalam negeri kita. Pejabat-pejabat akan makin hati-hati dalam berkomentar serta melakukan tindakan. Mereka tidak bisa lagi ngomong sembarangan, karena kritik dari publik mudah muncul. Bahkan cenderung penuh keberanian.

Namun Ariel mengungkapkan pula adanya ganjalan seperti kasus NU dan PDI Jatim. Ini jelas karena banyaknya pihak yang ikut campur tangan, termasuk pemma setempat. Khusus kasus PDI Jatim, meskipun hal ini terus berlarut-larut, tak mudah pemerintah lantas akan memvonis bahwa PDI Jatim tak diikutsertakan dalam Pemilu 1997. Mengingat kasus PDI bisa diselesaikan, meskipun membutuhkan waktu lama. Untuk memperlancar proses penyelesaian, menurut Ariel, Komnas HAM bisa diharapkan meskipun dia tidak yang mengambil keputusan. Karena Komnas HAM hanya bisa sekadar mencari fakta dan melaporkan hasil temuannya di lapangan.

(Bersambung hlm 6 kol 1-4)

Menyangkut persoalan PDI, Aberson, anggota DPR-RI dari Fraksi PDI mengatakan, bahwa hal ini terjadi karena cara pandang dan cara mensikapasi PDI di jajaran pemerintahan belum sama. Sekurang-kurangnya jika diamati dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan kepada rakyat lewat surat kabar. Semua pihak memang menyatakan itu urusan intern PDI, tetapi pada giliran PDI ingin menyelesaikan, tidak pernah mendapat ijin. Ini cenderung adanya keangkuhan.

Padahal bagi PDI, kasus Jawa Timur sudah tidak ada masalah. Perkara belum terbentuknya DPC se-Jatim maupun Korcam dan Kordes, karena yang ada sekarang sudah habis masa baktinya. "Jadi kalau saja PDI diberi ijin untuk melakukan konsolidasi di bawah, termasuk menyelenggarakan Kongres, Muscam dan Musdes, maka akan selesai dan tidak ada masalah," tegas Aberson. "Biarlah rakyat yang menilai, apakah benar PDI menghambat pemilu di Jatim," tambahnya.

Melihat kenyataan itu, Aberson melihat tidak banyak adanya kemajuan. Namun dia yakin, rakyat akan makin kritis, sehingga tuntutan akan demokrasi, penegakan HAM dan keterbukaan juga makin tinggi dan rakyat makin berani menyuarakan. Jika ini tidak diimbangi dengan perlakuan para birokrat, maka dapat akan mengundang persoalan baru.

Senada dengan Aberson, Soehardjo mengatakan, keterbukaan ini juga bisa menjadi bumerang bagi kita, jika kita tidak siap mengantisipasinya. Keterbukaan malah makin membuat jurang kesenjangan antara konglomerat dan rakyat jelata makin terkuak secara tajam. Hal ini dapat menjadi ancaman tersendiri bagi stabilitas nasional.

Padahal bila stabilitas nasional terganggu berarti mundur lagi pembangunan kita. Sedang hanya dengan dukungan stabilitas yang baiklah HAM dapat ditegakkan. Bagaimana pun stabilitas nasional tetap perlu dijaga.

Hanya sayangnya, ucap mantan anggota DPR/MPR, masih banyak masyarakat maupun beberapa pejabat sendiri yang belum banyak mengerti benar tentang pengertian stabilitas nasional yang dimaksudkan tersebut. Mereka membuat definisi sendiri-sendiri tentang stabilitas nasional. Ini membuat kepastian hukum tentang stabilitas nasional menjadi kabur.

Sebenarnya ukuran stabilitas menurutnya, sudah jelas, yakni ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila inilah yang juga menjadi dasar Demokrasi Pancasila. Jadi Demokrasi Pancasila sebenarnya baik, yakni demokrasi yang punya rambu-rambu.

Rambu-rambu tersebut adalah rambu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan nasional, kerakyatan serta keadilan sosial. Jika rambu-rambu tersebut bisa ditaati bersama oleh pemerintah, masyarakat, stabilitas nasional kita bisa terjaga. Demokrasi kita juga berjalan baik, tidak ada arogansi kekuasaan. Jika ada pejabat yang arogan misalnya, mereka akan diingatkan oleh adanya rambu-rambu kemanusiaan. Demikian juga jika ada keputusan yang tidak adil, mereka akan kembali pada rambu-rambu keadilan sosial.

(Sambungan hlm 1)

Jika sekarang ada pejabat yang belum bisa menerapkan Demokrasi Pancasila semacam itu, maka yang salah bukan Demokrasi Pancasila, tetapi pelaku-pelakunya. Harus diakui, sekarang belum semua aparaturnya negara bisa menjalankan tugas dengan profesional, dedikasi dan penuh integritas.

Sedang soal sikap arogan, baik itu tokoh formal maupun non formal, menurut Ariel, karena tradisi, peninggalan leluhur, sejarah panjang yang membentuk masyarakat kita masih diwarisi sistem feodalisme. Itu kebiasaan masyarakat. Namun lama-lama juga akan hilang, karena kondisi negara kita.

Saling terkait

Ariel melihat adanya keberanian masyarakat yang mau menyatakan pendapatnya menentang atau beda paham dengan pemerintah atau terhadap hal-hal tertentu. Ini disebabkan kondisi negara kita sendiri yang memang masih berkembang, didukung masalah ekonomi masyarakat dan pendidikan yang maju, yang mengantarkan masyarakat berani berpendapat.

Negara-negara lain juga diawali demikian. Seperti Jepang, Amerika, Inggris dan negara maju lainnya, yang diawali dengan perbedaan pendapat antara masyarakat dan pemerintah. Itulah proses demokrasi. Pemerintah kita juga akan menghadapi demikian, karena ekonomi dan pendidikan masyarakat sudah lebih baik dibandingkan sebelum 50 tahun yang lalu. Kemajuan pendidikan dan ekonomi masyarakat terlihat dimulai pada zaman Orde Baru.

Ariel bisa memaklumi kalau masih ada sebagian masyarakat yang selalu menuntut terus terhadap pemerintah adanya keterbukaan. Hal itu wajar, tetapi mereka harus juga tahu, proses keterbukaan memerlukan waktu yang cukup lama. Inilah keterbukaan di negara kita yang masih dikendalikan.

Sementara Wakil Ketua Komnas HAM, Marzuki Darusman melihat, persoalan keterbukaan, demokrasi dan HAM, makin hari kita rasakan makin meningkat. Ketiganya memang saling terkait, sehingga ketiganya harus kita bangun secara sinergi.